TESIS

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY* (CSR) PADA PT HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Magister Pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin

Diajukan Oleh:

NUR ALIFHIA MUHAMMAD

NIM: E012222018

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan diajukan oleh

NUR ALIFHIA MUHAMMAD

E012222018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **04 Desember 2024**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. H. M. Thahir Haning, M.Si.	**Prof. Dr. H. Muhammad Yunus, MA.**
NIP 195705071984031001	**NIP 195910301987031002**

Ketua Program Studi Administrasi Publik,	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
Dr. Gita Susanti, M.Si.	**Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si.**
NIP 196503111991032001	**NIP 197508182008011008**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **NUR ALIFHIA MUHAMMAD**

NIM : E012222018

Jurusan/Program Studi : Magister Adminsitrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan Judul : **"Efektivitas Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2023, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan;

Nur Alifhia Muhammad

ABSTRAK

NUR ALIFHIA MUHAMMAD. Efektivitas Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh M. Thahir Haning dan Muhammad Yunus).

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilyaha Peisisr Kabupaten Bantaeng dan (2) mendeskripsikan sejauhmana efektivitas dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian yakni di sekitar Kawasan Industri Bantaeng yaitu PT Huadi Nickel Alloy Indonesia dan wilayah sekitarnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, serta pengumpulan dokumen dari berbagai sumber media cetak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di wilayah pesisir berdasarkan 3 (tiga) indikator menurut teori Richard M. Steers yaitu: (1) Pencapaian Tujuan, di mana pendistribusian program CSR yang dilaksanakan masih belum mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan, sehingga distribusinya belum merata; (2) Integrasi, yang menunjukkan bahwa komunikasi antara perusahaan dan masyarakat masih kurang optimal. Masyarakat masih merasa tidak terpenuhi kebutuhannya dari program CSR ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih persuasif untuk lebih memahami kebutuhan nyata masyarakat di sekitar wilayah perusahaan; dan (3) Adaptasi, di mana program CSR yang difokuskan pada pendistribusian air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, proses distribusinya masih belum optimal, yang menyebabkan terjadinya konflik di antara warga sekitar kawasan industri.

Kata Kunci: Efektivitas, *Corporate Social Responsibility*, Masyarakat

ABSTRACT

NUR ALIFHIA MUHAMMAD. *Effectiveness of Corporate Social Responsibility (CSR) Management at PT Huadi Nickel Alloy Indonesia in the Coastal Area of Bantaeng Regency* (*supervised by* M. Thahir Haning and Muhammad Yunus).

This study aims to (1) describe the management of Corporate Social Responsibility at PT Huadi Nickel Alloy Indonesia in the Coastal Area of Bantaeng Regency and (2) describe the extent of effectiveness in the management of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Huadi Nickel Alloy Indonesia in the Coastal Area of Bantaeng Regency. The study was conducted using a qualitative approach with a descriptive method. The location of the study was around the Bantaeng Industrial Area, namely PT Huadi Nickel Alloy Indonesia and its surrounding areas. Data were collected through interviews, direct observation, and collection of documents from various print media sources. The results of the study showed that in the management of the Corporate Social Responsibility (CSR) program by PT Huadi Nickel Alloy Indonesia in the coastal area based on 3 (three) indicators according to Richard M. Steers theory, namely: (1) Achievement of Objectives, where the distribution of the CSR program implemented still does not cover all people in need, so that the distribution is not even; (2) Integration, which shows that communication between the company and the community is still less than optimal. The community still feels that their needs are not being met by this CSR program, so a more persuasive approach is needed to better understand the real needs of the community around the company area; and (3) Adaptation, where the CSR program focused on distributing clean water is very much needed by the community. However, the distribution process is still not optimal, which causes conflict among residents around the industrial area.

Keywords: *Effectiveness, Corporate Social Responsibility, Society*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan Tesis dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng"** ini sebagai bukti perjuangan yang panjang serta doa yang senantiasa mengalir dari orang tersayang. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Pascasarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. seorang yang sangat memberi pengaruh kepada peradaban umat manusia, mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan diharapkan semoga syafaatnya senantiasa mengalir kepada kita semua para manusia yang hidup di alam yang fana ini.

Setiap proses kehidupan tidak akan selalu berjalan dengan mudah, begitupun dengan proses yang dihadapi penulis di bangku kuliah hingga penulisan Tesis ini. Banyak tantangan serta dinamika yang menguras tenaga dan pikiran namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya serta tentunya didukung dari berbagai pihak. Hingga

akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal pencarian serta proses pemikiran penulis, sebab isi hati dan pikiran adalah hal terindah di dunia ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **MUHAMMAD** dan ibunda **NURJUMANTI** yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Serta suami saya Asman dan anak saya juga saudara-saudara saya tercinta, yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Juga seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Pada kesempatan kali ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si selaku Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. H. M. Thahir Haning, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Prof.Dr. H. Muhammad Yunus, MA selaku Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan arahan dan masukan serta waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dalam pengerjaan Tesis ini

5. Prof. Dr. Hamsinah, M.Si., Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si., dan Dr. Syahribulan, M.Si. selaku Tim Penguji
6. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis selama di bangku kuliah
7. Pak Suryadi, Pak Agus serta Kak Dwi selaku narasumber yang responsif membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Administrasi Publik yang senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis selama dibangku kuliah hingga penyelesaian Tesis ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang besar. Semoga Allah SWT. yang maha pemurah melimpahkan pahala berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan Tesis ini. Demi kesempurnaan Tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 16
BAB II KERANGKA TEORI **18**
A. Teori Administrasi Publik 18
B. Manajemen 33
C. Konsep Efektivitas 41
D. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) 52
E. Wilayah Pesisir 66
F. Penelitian Terdahulu 79
G. Kerangka Pikir 83
BAB III METODE PENELITIAN **88**
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 88
B. Jenis dan Tipe Penelitian 88
C. Sumber Data 90
D. Informan 91
E. Teknik Pengumpulan Data 93
F. Teknik Analisis Data 95
G. Teknik Pengabsahan Data 96
H. Fokus Penelitian 97

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 100
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 100
B. Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 108
C. Efektivitas Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng 119
1. Pencapaian Tujuan 123
2. Integrasi 136
3. Adaptasi 147
BAB V PENUTUP 163
A. Simpulan 163
B. Saran 164
DAFTAR PUSTAKA 166
LAMPIRAN 169

DAFTAR TABEL

2. 1	Penelitian Terdahulu	80
3. 1	Informan	92
4. 1	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng	101
4. 2	Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng	104
4.3	Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng	105
4.4	Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng	107
4. 5	Titik Sumur Bor CSR PT Huadi Nickel Alloy Indonesia	113
4. 6	Reduksi Data Indikator Pencapaian Tujuan	134
4. 7	Reduksi Data Indikator Integrasi	145
4. 8	Reduksi Data Indikator Adaptasi	157
4. 9	Data Aliran Sumur Bor	160

DAFTAR GAMBAR

2. 1 Kerangka Pemikiran 87
4. 1 PT Huadi Nickel Alloy Indonesia 108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya pesisir dan laut yang melimpah, menjadikannya salah satu negara dengan potensi kelautan terbesar di dunia. Dengan 17.504 pulau, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana setiap pulaunya memiliki keunikan tersendiri dalam hal ekosistem laut, sumber daya perikanan, serta potensi pariwisata. Garis pantai Indonesia membentang sepanjang 108.000 kilometer, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia. Luas wilayah lautnya mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi, sehingga laut menjadi bagian penting dalam struktur geografis Indonesia, mencakup sekitar 77,11% dari total luas wilayahnya. Kondisi ini memberikan keuntungan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta pesisir.

Sumber daya tersebut berperan besar dalam pembangunan nasional, dengan sektor-sektor utama seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, dan permukiman berkembang pesat di wilayah pesisir. Sekitar 60% penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di wilayah pesisir, menjadikannya pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Wilayah pesisir juga menjadi gerbang utama bagi perdagangan dan transportasi internasional, di mana pelabuhan besar memainkan peran penting dalam menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain. Potensi pariwisata

pesisir sangat besar, dengan pantai-pantai yang indah, banyak terumbu karang, serta kekayaan hayati laut yang beraneka ragam, menjadikan Indonesia salah satu destinasi wisata paling diminati di dunia. Selain itu, sektor perikanan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan memenuhi kebutuhan pangan domestik. Namun, meningkatnya aktivitas manusia di wilayah ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan pesisir, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting agar sumber daya pesisir dan laut Indonesia dapat dimanfaatkan dengan optimal tanpa merusak lingkungan.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada di sekitar mereka, baik itu dari laut maupun daratan. Mayoritas penduduk di kawasan pesisir menggantungkan mata pencaharian mereka pada aktivitas seperti menangkap ikan, membudidayakan rumput laut, serta berbagai pekerjaan lainnya yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya laut dan wilayah pesisir. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menjelaskan mengenai wilayah pesisir yang merupakan area peralihan atau zona transisi antara ekosistem darat dan laut.

Hal ini menyebabkan wilayah pesisir memiliki posisi yang strategis dan sifatnya yang unik, wilayah pesisir memiliki produktivitas yang sangat

tinggi dan menjadi sumber utama penghidupan bagi masyarakat lokal. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti perikanan, budidaya rumput laut, maupun pariwisata cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup penduduk. Namun, keunikan dari ekosistem ini juga membawa tantangan dalam hal pengelolaannya, salah satunya yaitu konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Selain mengancam ekosistem wilayah pesisir, ini juga berdampak terhadap kesejahtraan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Maka dari itu, sangat penting untuk menerapkan pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan, diharapkan dapat tercipta kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sambil memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengelolaan wilyah pesisir di Indonesia saat ini telah menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, termasuk pesisir dan laut. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, hingga pelestarian sumber daya alam demi kepentingan masyarakat setempat dan pembangunan daerah. Namun,

meskipun regulasi ini telah disusun, dalam praktiknya, masih terdapat masalah dalam pengelolaan wilayah pesisir yang memerlukan perhatian. Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah praktik privatisasi lahan pesisir oleh perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan masyarakat pesisir yang akhirnya kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya yang seharusnya dapat menopang kehidupan mereka sehari-hari. Di sisi lain, keberadaan peraturan daerah yang tumpang tindih sering kali menambah kompleksitas pengelolaan wilayah pesisir. Beberapa pemerintah daerah mengeluarkan regulasi yang saling bertabrakan, sehingga menciptakan kebingungan dan menghambat upaya untuk menciptakan tata kelola yang baik. Tidak hanya permasalahan sosial, tantangan lingkungan di wilayah pesisir juga semakin mengkhawatirkan. Pencemaran udara, pencemaran laut akibat limbah industri serta akses terbatas terhadap air bersih menjadi masalah yang mendesak untuk segera diatasi.

Kondisi lingkungan yang memburuk ini tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas hidup penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Terjadinya degradasi lingkungan menyebabkan banyak masyarakat pesisir kehilangan mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sumber daya alam di wilayah pesisir. Mengingat berbagai tantangan yang ada, pengelolaan wilayah pesisir tidak lagi bisa dianggap sebagai tugas yang sederhana bagi pemerintah daerah. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan

menyeluruh dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah daerah harus mampu menjalin kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sebanyak 24 kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis, dengan wilayah pesisir yang membentang sepanjang sekitar 21,5 kilometer di bagian barat dan timur. Letak pesisir ini menjadi salah satu aset penting bagi kabupaten, karena memberikan berbagai peluang besar bagi pengembangan sektor ekonomi. Sektor perikanan dan budi daya rumput laut menjadi dua sektor utama yang dapat dikembangkan secara optimal, mengingat wilayah pesisir ini memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Terdapat tiga wilayah yang termasuk dalam kawasan pesisir di Kabupaten ini, yaitu Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Pa'jukukang.

Keberagaman hayati mendukung beragam aktivitas ekonomi, seperti perikanan tangkap, budi daya rumput laut, serta sektor pariwisata yang mulai berkembang di kawasan ini. Selain itu, wilayah pesisir ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor kelautan lainnya seperti pengolahan hasil laut, yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Melihat potensi yang ada, Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat menjadi salah satu daerah unggulan di Sulawesi Selatan, khususnya dalam pengembangan sektor perikanan, budi daya rumput laut,

dan pariwisata pesisir. Jika potensi ini dikelola secara berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat, Bantaeng dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis, serta menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia dalam memanfaatkan potensi wilayah pesisir secara optimal.

Ketiga kecamatan tersebut memiliki potensi yang dikembangkan masing-masing, yang mana di wilayah pesisir Kecamatan Bissappu dikenal dengan dominasi kegiatan budidaya rumput laut yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Di sisi lain, Kecamatan Bantaeng yang juga merupakan pusat administratif Kabupaten Bantaeng, memiliki potensi ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Selain sektor perikanan yang juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi, kecamatan ini menonjol dalam sektor pariwisata. Lokasinya yang strategis di pesisir menjadikan kawasan ini sebagai destinasi yang menjanjikan, terutama dengan daya tarik wisata pantai seperti Pantai Seruni dan Pantai Lamalaka. Selain potensi wisata pantai, kegiatan perikanan tangkap di kecamatan ini tetap aktif, dengan banyak nelayan yang memanfaatkan sumber daya laut untuk mendukung kesejahteraan keluarganya.

Integrasi antara sektor perikanan dan pariwisata di Kecamatan Bantaeng menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki berbagai sektor unggulan. Sementara itu, Kecamatan Pa'jukukang memiliki karakteristik pesisir yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Mayoritas penduduk pesisir di wilayah ini lebih fokus

pada kegiatan perikanan tangkap, di mana hasil tangkapan ikan menjadi komoditas utama yang dijual di tempat pelelangan ikan (TPI). TPI di Kecamatan Pa'jukukang merupakan pusat aktivitas ekonomi penting, di mana hasil tangkapan laut diperdagangkan dan menjadi sumber pendapatan utama bagi nelayan. Selain perikanan tangkap, masyarakat juga aktif membudidaya rumput laut yang semakin mendukung nilai ekonomi masyarakat lokal.

Wilayah ini juga memiliki potensi wisata, salah satu lokasi yang tengah dikembangkan adalah Pantai Marina di Desa Baruga, yang memiliki keindahan alam khas pesisir dan diharapkan mampu menarik wisatawan. Potensi pariwisata ini dipandang sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Semua kecamatan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Kabupaten Bantaeng. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat setempat tidak bisa diabaikan. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi-potensi ini dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan, serta menjamin bahwa sumber daya laut dan pesisir dapat dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan jangka panjang.

Wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Potensi ini terutama terlihat pada sektor kelautan,

perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya yang melimpah. Namun, dalam upaya pemanfaatan potensi tersebut, masih terdapat berbagai tantangan signifikan yang perlu dihadapi dan diselesaikan agar pengembangan ekonomi di kawasan pesisir dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan laporan dari www.indonesiana.id, sejak dimulainya aktivitas industri di Kabupaten Bantaeng, khususnya di Kecamatan Pa'jukukang yang mencakup area seluas 1.000 hektar, tujuan dari pembangunan industri tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri. Kehadiran kawasan industri ini diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian, tidak hanya bagi Kabupaten Bantaeng, tetapi juga untuk wilayah regional yang lebih luas. Pembangunan kawasan ini didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Bantaeng No. 2 Tahun 2012, yang menetapkan Kecamatan Pa'jukukang sebagai kawasan industri dengan total luas mencapai 3.128 hektar.

Penetapan peraturan ini dapat memberikan penguatan terhadap kawasan industri ini. Lebih lanjut, kawasan ini juga telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No. 9 Tahun 2022 terkait dengan daftar Proyek Strategis Nasional. Hal ini mempertegas komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng. Proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur dan industri, tetapi juga diharapkan akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan

peningkatan pendapatan. Meskipun demikian, di balik potensi besar tersebut, terdapat tantangan yang perlu ditangani dengan serius, salah satunya adalah dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas industri. Pemerintah, bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya, perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan ini. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng harus dilakukan secara menyeluruh, dengan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif. Ini berarti tidak hanya berfokus pada pengembangan industri dan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Media berita www.indonesiana.id menerbitkan artikel yang di ditulis oleh Gaffar (2023), diungkapkan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan lahan di Kabupaten Bantaeng, secara tidak langsung telah menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat lokal, khususnya bagi penduduk pesisir di Kecamatan Pa'jukukang. Meskipun tujuan awal dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan industri dan memperkuat perekonomian, kenyataannya justru kebijakan tersebut membawa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi

sandaran utama mata pencaharian mereka. Kehadiran industri besar di wilayah ini tidak hanya mengubah tata ruang, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang menjadi dasar keberlangsungan hidup penduduk pesisir. Salah satu dampak yang paling signifikan dari kehadiran industri adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya air. Perubahan tata kelola lahan menyebabkan sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga mulai mengering, sehingga banyak penduduk yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Dampak ini tidak hanya dirasakan dalam aktivitas rumah tangga, tetapi juga pada sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada air, seperti industri rumahan pembuatan batu merah, di mana air merupakan elemen penting dalam proses produksinya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok antara tujuan pembangunan industri yang dicanangkan oleh pemerintah dengan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat lokal. Meskipun pembangunan industri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, kenyataannya, manfaat dari pembangunan ini belum dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan, di mana aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan

lingkungan, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari perubahan yang terjadi.

Menangani masalah yang dialami oleh masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Pa'jukukang, khususnya di area yang dekat dengan kawasan industri, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan secara maksimal. Program CSR ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi yang efektif bagi perusahaan dalam mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas industri terhadap lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika diterapkan dengan baik, CSR dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Menurut MC William, Siegel, dan Wright dalam Ririh (2021), CSR tidak hanya sekadar dilihat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai investasi strategis yang berpotensi besar dalam meningkatkan reputasi perusahaan. Lebih dari itu, CSR juga berperan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk bersaing di industri.

Perusahaan yang mampu mengimplementasikan program CSR dengan baik akan mampu menciptakan citra positif yang membedakan mereka dari para pesaingnya. Citra ini akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik, serta menarik minat masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya berfungsi sebagai program sosial semata, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang

menguntungkan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Priliantini, Venus dan Herlina (2019) menegaskan bahwa CSR merupakan bagian penting dari etika bisnis yang saat ini menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan perusahaan, terutama di pasar modal yang semakin kompetitif. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya CSR tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai instrumen bisnis yang strategis dan berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR yang menyentuh aspek sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan, terutama di masyarakat lokal, sangatlah diperlukan. Dengan menjalankan CSR secara konsisten dan berkomitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan di area tempat mereka beroperasi.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi dasar hukum bagi aktivitas perusahaan, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Di dalam Pasal 74 ayat (1) dari undang-undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang atau yang berkaitan erat dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk

mengejar keuntungan bisnis semata, tetapi juga dituntut untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi yang mereka lakukan dengan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari operasional mereka. Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan diharapkan mampu menjalankan kegiatan yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, serta bermanfaat bagi masyarakat setempat. Untuk memperjelas dan memperkuat pelaksanaan CSR ini, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 yang bertujuan sebagai pedoman praktis dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam PP No. 47/2012, khususnya di Pasal 4 ayat (1), dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilaksanakan oleh direksi perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Rencana ini tidak bisa dijalankan secara sepihak oleh manajemen perusahaan, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan anggaran yang telah disepakati bersama. Hal ini menekankan bahwa CSR bukan sekadar kewajiban moral yang dijalankan tanpa perencanaan yang jelas, melainkan merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang membutuhkan perencanaan dan pengawasan. Implementasi CSR yang baik tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasional perusahaan, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan di mata publik.

Masyarakat cenderung lebih percaya pada perusahaan yang menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.

Terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir yang berada di dekat area industri, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menyediakan air bersih bagi penduduk setempat. Program ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2021, yang mana regulasi tersebut menekankan bahwa TJSLP merupakan kewajiban perusahaan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan seimbang dengan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Meskipun penyediaan air bersih ini merupakan langkah yang positif dalam mengatasi masalah kurangnya air bersih pada masyarakat diarea tersebut namun kuantitas air yang diberikan masih tergolong terbatas.

Hal ini menyebabkan masyarakat harus berebut air bersih yang berujung konflik antar sesama masyarakat itu sendiri. Berdasarkan situasi ini, penulis berpendapat bahwa perlu untuk mengetahui efektivitas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada

efektivitas pengelolaan CSR perusahaan terkait dengan pendistribusian air bersih dikelola oleh perusahaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka judul yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu **Efektivitas Pengelolaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng

2. Untuk mendeskripsikan efektivitas dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian dalam Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam hal efektivitas pengelolaan program. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan akademik dan memperluas pemahaman tentang bagaimana suatu program dapat direncanakan, diimplementasikan, agar efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan program, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dampaknya terhadap masyarakat.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan konkret mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan program, terutama terkait dengan efektivitas implementasi program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pengelolaan program, sehingga dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang

diperlukan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pengelolaan program di masa mendatang.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Istilah "administrasi" berasal dari bahasa Latin, yang terbentuk dari gabungan dua kata: "Ad," yang berarti "menuju," dan "ministrate," yang berarti "memberikan jasa, bantuan, atau pelayanan." Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "Administration," yang mengandung arti "to serve" atau "melayani." Oleh karena itu, administrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang terencana dan sistematis, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat atau kelompok tertentu.

Administrasi bukan hanya sekadar tindakan memberikan pelayanan, tetapi juga melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien. Dalam konteks ini, administrasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen dalam sebuah organisasi atau lembaga, sehingga segala aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan demikian, administrasi memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh Warsono, dkk. (2019) terdapat dua kelompok pemahaman yang berbeda mengenai makna administrasi, yang mana masing-masing

kelompok mempersepsikan administrasi dalam konteks dan cakupan yang variatif, yakni sebagai berikut:

a. Administrasi dalam arti sempit

   Pengertian yang lebih sempit, administrasi dapat diartikan sebagaimana diungkapkan oleh Warsono, dkk. (2019) yaitu bahwa "Administrasi secara sempit berasal dari istilah 'Administratie' dalam bahasa Belanda, yang merujuk pada serangkaian kegiatan administratif yang meliputi aktivitas seperti pencatatan, surat-menyurat, pembukuan sederhana, pengetikan, pengelolaan agenda, dan sejenisnya, yang bersifat teknis dalam ranah ketatausahaan." Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan rangkaian aktivitas tata usaha yang fokus pada pengelolaan dokumentasi, termasuk kegiatan pembukuan dan pengarsipan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang terstruktur serta memudahkan individu atau organisasi dalam mengelola dan mengakses kembali informasi yang sudah tersedia sebelumnya. Dengan demikian, peran administrasi dalam konteks ini sangat penting untuk kelancaran operasional suatu kegiatan atau institusi.

b. Administrasi dalam arti luas

   Chandler dan Plano dalam Warsono, dkk. (2019) menjelaskan bahwa "The Public Administration Dictionary" menolak pengertian administrasi yang hanya terbatas pada aktivitas ketatausahaan.

Mereka mendefinisikannya sebagai sebuah proses di mana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Selain itu, terdapat berbagai pandangan lain mengenai definisi administrasi yang lebih luas. Misalnya, Menurut Herbert A. Simon dalam Warsono, dkk. (2019) menyatakan bahwa administrasi adalah serangkaian aktivitas kelompok yang dilakukan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Dwight Waldo, juga dalam sumber yang sama, mengartikan administrasi sebagai upaya kooperatif yang ditandai dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Di sisi lain, terdapat pengertian administrasi yang lebih mendalam dari pakar Indonesia, yaitu Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2018:2) menyatakan bahwa administrasi mencakup keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2018), terdapat beberapa elemen penting, yakni pertama, administrasi sebagai seni dianggap sebagai sebuah proses yang dapat dipahami hanya pada awalnya, sementara akhirnya masih belum dapat diprediksi. Kedua, administrasi memiliki unsur-unsur penting, di mana unsur tersebut mencakup adanya interaksi antara dua individu atau lebih yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, serta tersedianya peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ketiga, konsep administrasi sebagai

proses kerjasama bukanlah hal yang baru, karena fenomena ini telah ada bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, pemahaman tentang administrasi menjadi lebih kaya dan kompleks, mencakup berbagai aspek interaksi sosial dan tujuan kolektif.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, baik yang disampaikan dalam pengertian yang luas maupun yang sempit, kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi adalah sebuah konsep yang sangat kompleks dan beragam dalam penafsirannya. Namun, meskipun terdapat berbagai pemahaman terkait administrasi, inti dari konsep ini tetap memiliki kesamaan esensial, yaitu melibatkan beberapa elemen dasar. Elemen-elemen tersebut mencakup kehadiran manusia sebagai pelaku, adanya tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan kegiatan yang terorganisir, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung semua aktivitas tersebut. Dengan demikian, administrasi tidak hanya sekadar aktivitas rutin, tetapi merupakan suatu sistem yang terstruktur yang melibatkan kerjasama antara individu dalam rangka mencapai tujuan kolaboratif secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks organisasi, pemerintahan, maupun masyarakat secara umum.

2. Prinsip – Prinsip Administrasi

Ada 14 prinsip administrasi menurut Fayol dalam Pasolong (2017:15) yaitu sebagai berikut:

a. Pembagian pekerjaan, prinsip ini menekankan bahwa dengan membagi pekerjaan secara efektif, tenaga kerja dapat berfokus pada tugas tertentu yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka.
b. Wewenang, adanya wewenang yang jelas memberikan struktur dalam organisasi. Dengan wewenang yang ditentukan, para pekerja menjadi lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik, karena mereka tahu siapa yang memberikan instruksi dan mengawasi pekerjaan mereka.
c. Disiplin, kunci untuk memastikan bahwa setiap anggota tim menjalankan tugas mereka sesuai dengan harapan organisasi. Dengan disiplin yang baik, tenaga kerja lebih mampu untuk melaksanakan perintah dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
d. Kesatuan komando, prinsip ini menyatakan bahwa setiap pekerja harus menerima instruksi hanya dari satu atasan untuk menghindari kebingungan dan konflik perintah. Dengan adanya kesatuan komando, koordinasi dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih lancar.

e. Kesatuan arah, beberapa kelompok dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama dapat dipimpin oleh seorang manajer yang menggunakan satu rencana. Hal ini memastikan bahwa semua pihak bergerak menuju tujuan yang sama, sehingga meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan.
f. Mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dalam sebuah organisasi, kepentingan bersama harus diutamakan. Meskipun setiap pekerja memiliki kebutuhan pribadi, keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan keseluruhan kepentingan organisasi untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan bersama.
g. Pemberian upah, pemberian upah yang jelas dan adil adalah salah satu cara untuk menghargai tenaga kerja. Dengan imbalan yang sesuai, pekerja akan merasa termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap organisasi.
h. Pemusatan, mengacu pada pengurangan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh manajemen puncak. Hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga dapat mengurangi partisipasi dan inovasi dari tingkat bawah.
i. Rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat secara efektif dikelola oleh seorang manajer. Hal ini berhubungan dengan garis wewenang

yang jelas dan struktur organisasi yang mendukung efisiensi komunikasi serta pengawasan.

j. Tata tertib, mengacu pada penataan orang dan sumber daya dalam hal yang tepat dan waktu yang tepat. Dengan pengaturan yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalisir pemborosan sumber daya.

k. Keadilan, seorang manajer yang adil dan terbuka akan membangun hubungan yang baik dengan bawahannya. Keadilan dalam perlakuan akan meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara anggota tim.

l. Stabilitas pada jabatan personal, dalam posisi pekerjaan penting untuk mencegah ketidakefisienan yang mungkin timbul akibat seringnya perubahan personel. Ketika karyawan merasa aman dalam posisi mereka, mereka cenderung lebih berkomitmen dan produktif.

m. Inisiatif, dalam tenaga kerja merujuk pada kemampuan mereka untuk mengambil langkah proaktif dalam memulai dan melaksanakan rencana kerja. Pekerja yang berinisiatif dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan organisasi.

n. Rasa persatuan, tim yang terbentuk dari rasa persatuan dan kesatuan dalam organisasi menciptakan suasana kerja yang harmonis. Ketika anggota tim merasa saling terhubung, mereka lebih

cenderung untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Herbert A. Simon dalam Pasolong (2017:16) menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip dasar administrasi yang sifatnya lebih umum dan dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi. Pertama, peningkatan efisiensi administrasi dapat dicapai dengan memanfaatkan spesialisasi tugas di antara anggota kelompok. Dalam konteks ini, ketika setiap individu diberikan tugas yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, kinerja kelompok secara keseluruhan akan lebih optimal karena setiap orang bekerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Selain itu, pembagian tugas yang jelas juga mengurangi tumpang tindih pekerjaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih terorganisir dan produktif.

Kedua, pembentukan struktur hierarkis yang jelas dalam suatu organisasi merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman yang baik mengenai peran, posisi, dan tanggung jawab mereka. Dengan hierarki yang terstruktur, komunikasi antaranggota menjadi lebih efektif, karena jalur komunikasi yang jelas akan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan meningkatkan alur koordinasi antarlevel. Ketiga, efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi rentang kendali atau pengawasan dalam setiap sektor. Dengan cara ini, pengawasan dapat dilakukan lebih fokus dan terarah, sehingga jumlah pengawas yang diperlukan bisa diminimalisasi tanpa mengurangi efektivitas pengawasan. Hal ini juga mendorong terciptanya komunikasi

yang lebih intensif antara pemimpin dan bawahan, yang pada akhirnya memperkuat sinergi di dalam organisasi. Prinsip terakhir, efisiensi administrasi juga bisa dicapai dengan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu seperti tujuan organisasi, proses kerja, karakteristik pelanggan, atau lokasi. Dengan pengelompokan yang strategis ini, pengawasan terhadap setiap bagian organisasi akan lebih tepat sasaran, sehingga setiap tim atau kelompok kerja dapat lebih terkoordinasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Keempat prinsip ini menunjukkan pentingnya pengaturan struktural dan fungsional dalam administrasi, yang berperan besar dalam membentuk sebuah organisasi yang efisien, produktif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada.

Prinsip dasar dalam administrasi pada dasarnya fokus pada efisiensi, dengan pengertian bahwa administrasi sendiri mempunyai batasan yang memiliki kaitan dengan aspek perilaku individu. Hal ini disebabkan rasionalitas yang diharapkan dalam konteks administrasi cenderung terbatas pada perilaku individu itu sendiri yang umumnya memprioritaskan kepuasan. Dalam perjalanannya, manusia memiliki keterbatasan dalam mencapai hasil maksimal, sehingga tidak dapat sepenuhnya mengoptimalkan setiap aspek dari tindakan yang diambil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam administrasi merupakan suatu hal esensial dan tidak bisa dihindari jika kita ingin

menjalankan tugas serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efisiensi ini berfungsi sebagai landasan bagi segala aktivitas administratif, di mana individu dan kelompok dituntut untuk bekerja secara optimal dengan mempertimbangkan kemampuan dan batasan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik administrasi, penting untuk merancang dan melaksanakan sistem yang tidak hanya memaksimalkan potensi tetapi juga memperhatikan kenyataan bahwa kepuasan individu serta keterbatasan manusiawi harus diperhitungkan. Dalam konteks ini, efisiensi bukan hanya sekedar metric kinerja, tetapi juga mencerminkan integrasi antara pencapaian tujuan dan pengelolaan sumber daya manusia yang bijaksana. Dengan demikian, efisiensi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam administrasi organisasi.

3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari individu hingga kelompok, dan dari sektor swasta hingga pemerintahan. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2018:3) administrasi dapat dilihat sebagai suatu proses kerja yang telah ada sejak peradaban manusia mulai berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi bukanlah sebuah konsep baru, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sejak awal masyarakat terbentuk. Ketika manusia mulai mengorganisir kelompok-kelompok sosial,

mereka secara tidak langsung telah mengembangkan bentuk awal dari administrasi, yang berfungsi untuk mengatur dan mengoordinasikan aktivitas-aktivitas mereka demi mencapai tujuan bersama. Seiring dengan perkembangan peradaban, administrasi menjadi semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, mulai dari pengelolaan organisasi kecil hingga struktur negara yang besar.

Administrasi publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga berperan dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program-program pemerintah, dan memastikan bahwa layanan publik diberikan secara efisien kepada masyarakat. Dalam hal ini, administrasi menjadi tulang punggung yang memastikan roda pemerintahan dapat berputar dengan baik, dan kelangsungan negara dapat terjaga. Lebih jauh lagi, administrasi dalam berbagai aspek kehidupan memengaruhi keberhasilan banyak sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Keberhasilan suatu organisasi, baik itu swasta maupun publik, sangat bergantung pada bagaimana administrasi dijalankan. Oleh karena itu, peran administrasi sebagai sistem kerja yang terstruktur tidak hanya membantu memastikan pencapaian tujuan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang kehidupan manusia.

Nicholas Henry dalam Pasolong (2017:22) menjelaskan ruang lingkup administrasi publik dapat dikaji melalui berbagai topik penting yang menjadi inti dari perkembangan ilmu administrasi itu sendiri. Pertama, aspek organisasi publikberfokus pada model-model organisasi yang ada

serta perilaku birokrasi yang berlangsung di dalamnya. Ini mencakup bagaimana birokrasi berfungsi, struktur organisasi, dinamika hubungan antara individu dalam organisasi, dan pengaruhnya terhadap efisiensi serta efektivitas layanan publik. Kedua, manajemen publik mencakup beragam sistem dan pendekatan manajemen, yang di dalamnya termasuk evaluasi program, peningkatan produktivitas, serta proses penyusunan anggaran publik. Di sini juga dibahas pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan aspek vital dalam memastikan keberhasilan birokrasi, karena kualitas manajemen dan SDM yang baik akan berdampak langsung pada keberhasilan implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Ketiga, aspek implementasi berkaitan dengan berbagai pendekatan terhadap kebijakan publik dan proses pelaksanaannya di lapangan.

Topik ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan kebijakan oleh lembaga publik, tetapi juga mencakup tantangan dalam privatisasi, interaksi antar pemerintah dalam administrasi, serta pentingnya menjaga etika dalam birokrasi. Implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi hambatan di tingkat pelaksana, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga terkait agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan menggali lebih dalam ke dalam ruang lingkup ini, kita dapat memahami bahwa administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam struktur pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang

menjadikan administrasi sebagai elemen kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih teratur, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kencana (1994) menguraikan bahwa ruang lingkup dalam administrasi publik adalah sebagai berikut:

a. Bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan meliputi: administrasi dalam konteks hubungan dan gejala pemerintahan mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari administrasi pusat hingga pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Ini termasuk administrasi di pemerintahan pusat, daerah, kecamatan, kelurahan, desa, kotamadya, serta kota administratif. Selain itu, administrasi juga mencakup organisasi pemerintahan lain seperti departemen dan non-departemen yang membantu memastikan operasional yang efisien di berbagai tingkat pemerintahan.
b. Bidang kekuasaan, meliputi: administrasi dalam hal kekuasaan meliputi aspek yang lebih strategis, seperti administrasi politik luar negeri, yang berkaitan dengan hubungan antarnegara, serta administrasi politik dalam negeri yang berfokus pada urusan domestik. Di samping itu, administrasi partai politik dan administrasi kebijakan pemerintah juga penting untuk memastikan bahwa tujuan politik dan kebijakan dijalankan dengan tepat.
c. Bidang peraturan perundang-undangan, meliputi: administrasi dalam konteks peraturan perundang-undangan meliputi tiga landasan

penting yaitu landasan idiil yang mencerminkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip negara, landasan konstitusional yang berhubungan dengan hukum dasar negara (konstitusi), dan landasan operasional yang mencakup pelaksanaan teknis peraturan dan kebijakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Bidang kenegaraan, meliputi: administrasi dalam bidang kenegaraan mencakup berbagai aspek yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab negara. Ini meliputi tugas dan kewajiban negara dalam melindungi warganya, hak dan kewenangan negara dalam menjalankan pemerintahan, tipe dan bentuk negara (misalnya republik atau monarki), serta prinsip-prinsip dan fungsi negara yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan. Juga dibahas tujuan nasional dan bagaimana negara harus berupaya mencapainya.
e. Pemikiran hakiki, meliputi: administrasi publik tidak hanya terkait dengan operasional, tetapi juga mencakup aspek filosofis dan etis. Bidang ini melibatkan etika administrasi publik, yang berkaitan dengan prinsip moral dalam pelaksanaan tugas administrasi, estetika administrasi publik, yang mengacu pada nilai-nilai keindahan dalam proses administrasi, logika administrasi publik, yang menekankan pada rasionalitas dan kejelasan dalam pengambilan keputusan, serta hakekat administrasi publik yang membahas inti dari administrasi sebagai ilmu dan praktik.

f. Bidang ketatalaksanaan, meliputi: administrasi ketatalaksanaan berfokus pada berbagai bidang teknis operasional, seperti administrasi pembangunan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional, administrasi perkantoran yang mencakup manajemen kantor secara efisien, serta administrasi kepegawaian yang mengelola sumber daya manusia. Selain itu, administrasi juga mencakup administrasi kemiliteran, kepolisian, perpajakan, pengadilan, dan administrasi perusahaan yang melibatkan manajemen sektor privat.

Luasnya cakupan administrasi publik menjadikan aspek ini sebagai salah satu elemen yang paling krusial dalam menentukan definisi dan ruang lingkup administrasi publik itu sendiri, khususnya dalam konteks kepentingan publik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan internal, tetapi juga pada bagaimana pelayanan dan kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, menurut Pasolong (2017) ruang lingkup administrasi publik mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan, antara lain, kebijakan publik yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, birokrasi publik yang menjadi struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta manajemen publik yang fokus pada pengelolaan sumber daya dan proses operasional. Selain itu, kepemimpinan dalam administrasi

publik juga memegang peranan penting, karena berkaitan dengan arah dan visi yang ditetapkan oleh pemimpin dalam suatu organisasi publik.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pelayanan publik yang merupakan upaya untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Administrasi kepegawaian negara juga termasuk dalam ruang lingkup ini, di mana pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam hal ini, manajemen kinerja menjadi faktor penentu dalam evaluasi dan peningkatan produktivitas pegawai di lingkungan pemerintahan. Di samping itu, etika administrasi publik memainkan peran yang tidak kalah penting, yang berfungsi sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa semua tindakan dalam administrasi publik dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, kompleksitas dan multifaset dari ruang lingkup administrasi publik ini menegaskan betapa pentingnya sektor ini dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

B. Manajemen

1. Definisi Manajemen

Istilah "manajemen" secara etimologis berasal dari bahasa Prancis, yaitu "management," yang berarti seni dalam mengelola dan menjalankan berbagai aktivitas. Dalam makna yang lebih luas, manajemen dipahami sebagai suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan

mengendalikan berbagai sumber daya yang tersedia. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup serangkaian tahapan yang tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana dan strategi yang tepat, tetapi juga mengelola sumber daya yang meliputi tenaga kerja, keuangan, dan material secara optimal.

Pengelolaan ini sangat penting agar setiap sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan produktivitas dan hasil yang diinginkan. Selain itu, proses pengawasan dan evaluasi juga merupakan bagian integral dari manajemen, di mana setiap kegiatan yang telah direncanakan akan dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan atau masalah, tindakan korektif dapat segera diambil guna menjaga jalannya proses menuju tujuan akhir. Manajemen juga menekankan pentingnya kerja sama yang baik antarbagian dalam sebuah organisasi, sehingga semua elemen dapat berfungsi dengan harmonis dan saling mendukung.

Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa organisasi dapat mencapai sasaran dengan waktu yang tepat dan menggunakan sumber daya secara efisien untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu. Oleh karena itu, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Ini adalah kunci untuk mencapai efektivitas operasional, efisiensi, serta

keberlanjutan jangka panjang. Manajemen juga menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada hasil dan berfokus pada upaya mencapai visi dan misi organisasi dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada di lingkungan internal maupun eksternal. Tanpa manajemen yang baik, organisasi berisiko kehilangan arah dan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya secara optimal.

Manajemen merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam administrasi. Menurut Sari (2012), manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu sekaligus seni dalam mengatur dan mengarahkan orang lain agar bersedia bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Dalam praktiknya, proses manajemen tidak hanya membutuhkan pemahaman dasar tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan analitis yang tinggi untuk mengevaluasi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data dan realitas yang ada. Selain itu, manajemen juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif, di mana pemimpin harus mampu memotivasi timnya untuk bekerja secara produktif dan mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, penggunaan metode yang tepat dan sesuai sangat diperlukan untuk melaksanakan berbagai rencana dan agenda yang telah dirumuskan secara kolektif. Keberhasilan manajemen tidak hanya tergantung pada pengaturan sumber daya, tetapi

juga pada kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai elemen agar bekerja secara sinergis dan harmonis.

Selaras dengan pendapat tersebut, Solihin (2012) menegaskan bahwa manajemen mencakup serangkaian aktivitas penting yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Setiap tahapan ini memiliki peran khusus dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, modal, material, serta teknologi yang harus dikelola secara strategis untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan pengelolaan yang optimal, organisasi atau perusahaan diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif, yakni menghasilkan output yang sesuai dengan harapan, dan efisien, yaitu menggunakan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

Manajemen, dalam konteks ini, tidak hanya dilihat sebagai alat atau mekanisme untuk mencapai sasaran organisasi. Lebih dari itu, manajemen berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi dapat bekerja secara sinergis, sehingga seluruh departemen, unit, atau individu di dalamnya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi antarbagian dalam organisasi sangat penting, karena tanpa adanya koordinasi yang baik, sumber daya yang ada bisa saja tidak dimanfaatkan dengan tepat, yang berujung pada ketidakoptimalan dalam pencapaian hasil.

Manajemen memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir setiap aspek kehidupan manusia membutuhkan pengelolaan yang baik dan terstruktur agar berbagai kegiatan dapat dilakukan secara efisien dan mencapai hasil yang diharapkan. Tidak hanya terbatas pada satu bidang tertentu, manajemen merambah ke berbagai sektor kehidupan. Menurut Effendi (2014) kebutuhan akan manajemen dirasakan oleh semua pihak, baik individu, kelompok-kelompok kecil, maupun organisasi dengan skala yang lebih besar. Baik itu di ranah pribadi maupun profesional, manajemen berfungsi sebagai landasan penting dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi setiap aktivitas. Kebutuhan akan manajemen juga sangat relevan di dalam berbagai jenis organisasi. Dalam lingkup organisasi bisnis, misalnya, manajemen berperan penting dalam mencapai tujuan utama yaitu keuntungan atau profit.

Manajemen bisnis yang baik akan membantu perusahaan mengelola sumber daya, seperti manusia, keuangan, dan waktu, dengan cara yang paling efisien untuk memaksimalkan output yang dihasilkan. Begitu pula dalam organisasi sosial, yang lebih fokus pada tujuan kemanusiaan dan kepentingan masyarakat luas, manajemen tetap menjadi komponen vital yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara efektif dan memastikan bahwa program-program sosial yang dirancang dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selain itu, dalam organisasi pemerintahan, peran manajemen tidak bisa diabaikan. Manajemen

pemerintah bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik serta pengelolaan layanan untuk masyarakat. Dengan adanya manajemen yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya negara dikelola secara bijaksana dan tepat sasaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Setiap entitas tersebut membutuhkan manajemen untuk mengatur dan merencanakan berbagai kegiatan dan proses yang akan dilakukan, dengan tujuan akhir untuk memperoleh hasil yang setinggi mungkin di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, manajemen berfungsi sebagai alat untuk mengoordinasikan sumber daya dan kegiatan agar seluruh elemen dalam organisasi dapat berkolaborasi dengan baik, sehingga produktivitas dan efektivitas dapat meningkat. Proses manajemen ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan aktivitas, hingga evaluasi hasil, yang kesemuanya dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, manajemen tidak hanya sekedar konsep teoritis, melainkan suatu praktik yang esensial dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam berbagai bidang kehidupan serta organisasi.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Pendekatan manajemen klasik, terdapat beberapa fungsi fundamental yang telah diidentifikasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, staffing (pengadaan tenaga kerja), pengarahan,

koordinasi, pelaporan, dan penyusunan anggaran, yang sering disingkat dengan istilah POSDCORB. Fungsi-fungsi ini dianggap sebagai dasar yang universal dan berlaku di berbagai konteks organisasi. Penerapan fungsi-fungsi tersebut memungkinkan manajer untuk mengelola sumber daya dan aktivitas dengan lebih terstruktur dan terarah, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Menurut Allison dalam Pasolong (2017) seorang manajer baik yang bekerja pada sektor publik maupun swasta diwajibkan untuk menjalankan sejumlah fungsi manajemen yang esensial. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan yang terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan baik dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai fungsi manajemen ini sangat penting bagi setiap individu yang menduduki posisi manajerial, karena hal ini akan membantu mereka dalam merumuskan strategi yang tepat, mengelola tim, dan mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Keterampilan dalam setiap fungsi ini akan menentukan keberhasilan seorang manajer dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik di sektor publik maupun swasta, paling tidak menjalankan fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Menciptakan tujuan dan prioritas: Memformulasikan sasaran yang ingin dicapai dan menetapkan skala prioritas untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan program.
b. Menyusun rencana operasional: Merancang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
c. Melakukan pengorganisasian dan *staffing*: Mengatur sumber daya dan merekrut tenaga kerja yang tepat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam organisasi.
d. Mengarahkan para pegawai dan sistem kepegawaian: Mengarahkan serta mengawasi kinerja pegawai dan memastikan bahwa sistem kepegawaian beroperasi dengan lancar.
e. Mengendalikan kinerja: Memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sejalan dengan tujuan yang diharapkan.
f. Berhubungan dengan unit-unit eksternal: Berinteraksi dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit-unit atau lembaga eksternal yang terlibat dalam operasional organisasi.
g. Berhubungan dengan organisasi independen: Bekerjasama dengan lembaga independen untuk memperkuat jaringan atau kemitraan yang mendukung tujuan organisasi.

h. Menangani media massa dan publik: Mengelola komunikasi dan hubungan publik dengan media serta masyarakat untuk menjaga citra positif organisasi.

C. Konsep Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Kata "efektivitas" secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*effective*," yang mengandung makna berhasil atau menunjukkan suatu tindakan yang mampu menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam Kamus Ilmiah Popular, efektivitas diartikan sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil guna, atau kemampuan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rosalina (2012) menjelaskan bahwa efektivitas adalah elemen yang sangat penting dan fundamental untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dirumuskan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program yang dijalankan. Dengan demikian, suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai efektif jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga mencakup proses yang dilalui untuk mencapai hasil tersebut. Ketika suatu kegiatan dapat memenuhi atau bahkan melampaui target yang telah ditentukan, maka kegiatan tersebut dapat dianggap efektif dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi atau program yang bersangkutan.

Efektivitas bukan hanya sekadar pengukuran tentang seberapa baik suatu tindakan dilakukan, tetapi juga menekankan pada keberhasilan

dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap proses pengelolaan, fokus pada efektivitas sangat penting agar semua upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan dan relevan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang efektivitas akan menjadi kunci bagi pengambilan keputusan dan evaluasi dalam berbagai konteks, baik dalam lingkungan bisnis, pemerintahan, maupun dalam kegiatan sosial.

Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dalam suatu usaha, di mana suatu usaha dianggap efektif apabila dapat mencapai tujuannya secara ideal. Untuk memenuhi kriteria efektivitas, usaha tersebut harus mampu memberikan pengaruh atau menghasilkan perubahan yang signifikan, serta memberikan hasil yang relevan. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tujuan tersebut dapat direalisasikan. Pendapat ini diperkuat oleh Mahmudi (2005) yang menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan hubungan antara output dan tujuan. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula organisasi, program, atau kegiatan tersebut.

Kesimpulannya bahwa efektivitas berkaitan erat dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok, pencapaian tujuan, ketepatan waktu dalam penyelesaian, serta partisipasi aktif dari anggota organisasi. Semua elemen ini saling berkaitan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan yang dinyatakan serta hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas dapat

diartikan sebagai derajat kesesuaian antara apa yang ingin dicapai dan hasil yang diperoleh, yang pada akhirnya menunjukkan seberapa baik suatu usaha itu berhasil dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan pentingnya pengukuran efektivitas dalam evaluasi kinerja organisasi, program, atau kegiatan di semua konteks, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun sektor sosial.

Upaya untuk mengevaluasi suatu program dapat dilakukan dengan menerapkan konsep efektivitas, sebagaimana dinyatakan oleh Amiruddin (2020) konsep ini berfungsi sebagai salah satu faktor penentu dalam mengevaluasi apakah suatu program perlu mengalami perubahan signifikan atau tidak. Dalam konteks ini, efektivitas dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan program dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Penilaian efektivitas dapat ditinjau dari tiga komponen utama, yaitu masukan atau input, proses yang dijalankan, dan keluaran atau output. Dalam hal ini, sumber daya yang dipertimbangkan mencakup beberapa aspek, seperti ketersediaan personil yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta metode atau model yang akan diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Evaluasi efektivitas tidak hanya mencakup hasil akhir yang diperoleh, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses berlangsung dan apakah semua sumber daya digunakan secara optimal. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya sekadar selesai

dilaksanakan, tetapi juga memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Melalui pendekatan ini, evaluasi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan, sehingga setiap upaya yang dilakukan dapat lebih terfokus dan terarah pada pencapaian yang maksimal.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang efektivitas yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Target ini tentunya ditentukan sebelumnya sebagai acuan dalam proses pelaksanaan aktivitas atau program. Dengan kata lain, efektivitas tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang penting dalam menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan. Melalui pengukuran efektivitas, kita dapat mengetahui apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan ekspektasi yang telah dirumuskan, serta sejauh mana pencapaian tersebut dapat dikategorikan sebagai sukses atau perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut. Proses ini menjadi krusial dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas output di masa mendatang, serta untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, pengukuran efektivitas menjadi esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai inisiatif agar mereka dapat memberikan hasil yang maksimal dan relevan dengan kebutuhan yang ada.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak dapat dianggap sepele. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa efektivitas dapat dianalisis dari berbagai perspektif, yang mana hasilnya sangat dipengaruhi oleh siapa yang melakukan penilaian dan bagaimana mereka menginterpretasikan data yang ada. Salah satu cara yang umum untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan membandingkan antara rencana yang telah disusun sebelumnya dengan hasil nyata yang berhasil dicapai. Dalam konteks ini, kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai secara efektif memiliki peranan yang sangat penting. Menurut pemikiran Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2008), terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengukur pencapaian efektivitas suatu program, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang jelas sangat penting agar karyawan dapat melaksanakan tugas dengan fokus yang tepat, sehingga sasaran organisasi dapat diraih dengan lebih terarah dan efektif.
b. Kesejalasan startegi pencapaian tujuan, strategi merupakan panduan penting dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan strategi yang selaras, para pelaksana akan memiliki panduan yang jelas sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan dengan upaya operasional. Artinya, kebijakan yang baik dapat mendukung pelaksanaan rencana strategis dan memastikan tujuan tercapai secara efisien.
d. Perencanaan yang matang, perencanaan berarti mengambil keputusan saat ini mengenai tindakan yang akan dilakukan di masa depan, sehingga organisasi dapat bertindak sesuai rencana yang telah ditetapkan.
e. Penyusunan program yang tepat, setelah perencanaan dibuat, langkah selanjutnya adalah merinci rencana tersebut ke dalam program-program pelaksanaan yang jelas. Program yang tepat memberikan panduan bagi para pelaksana untuk bekerja dengan efektif.
f. Tersedia sarana dan prasarana, merupakan elemen penting untuk mendukung produktivitas. Efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas operasional.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, suatu program hanya akan mencapai sasarannya jika dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tanpa pelaksanaan yang tepat, tujuan organisasi mungkin tidak akan tercapai.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat manusia tidak sempurna, pengawasan dan pengendalian

yang baik diperlukan untuk memastikan tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan, sambil memberikan bimbingan yang konstruktif.

3. Indikator Efektivitas

Berdasarkan sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi seringkali melihat efektivitas sebagai perpaduan antara kualitas dan kuantitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Efektivitas di sini mencerminkan sejauh mana suatu proses produksi mampu menghasilkan output yang tidak hanya mencukupi dalam jumlah, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Dalam proses pengukurannya, salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa dekat hasil yang diperoleh dengan tujuan awal, sehingga memberikan dasar untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan. Selain itu, Richard M. Steers (1980) menyebutkan bahwa terdapat tiga indikator utama yang dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas suatu program atau aktivitas. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang lebih mendalam dan terperinci dalam menganalisis keberhasilan dan capaian suatu proyek. Dengan menggunakan indikator tersebut, evaluasi terhadap efektivitas tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang relevan dalam proses pencapaian

tujuan. Ini membantu manajer untuk tidak hanya melihat hasil dari sisi kuantitas dan kualitas, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil akhir dan efektivitas program secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi yang komprehensif dapat dilakukan untuk terus meningkatkan produktivitas dan keberhasilan di masa depan. Berikut ini adalah analisis lebih lanjut mengenai ketiga indikator yang dimaksud:

a. Pencapaian tujuan merupakan suatu langkah penting dalam setiap usaha atau program yang dilakukan, di mana setiap upaya yang diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari suatu proses. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan akhir dapat dilakukan dengan lebih baik dan terjamin, sangat diperlukan adanya tahapan-tahapan yang sistematis dalam proses pencapaiannya. Tahapan ini mencakup tidak hanya detail pencapaian dari masing-masing bagian, tetapi juga mencakup aspek periodisasi dalam setiap langkah yang diambil. Dengan adanya tahapan yang jelas, sebuah organisasi atau individu dapat merancang strategi yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Integrasi merujuk pada penilaian terhadap kapasitas sebuah organisasi dalam mengelola sosialisasi, serta meningkatkan

persetujuan dan kesepakatan di antara anggotanya. Hal ini juga mencakup aspek komunikasi yang efektif antara anggota kelompok masyarakat dan berbagai organisasi lainnya mengenai nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam konteks ini, integrasi bukan hanya soal menjalin komunikasi, tetapi juga bagaimana proses interaksi berlangsung di lapangan. Proses integrasi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi seberapa baik anggota kelompok dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

c. Adaptasi merujuk pada kemampuan individu atau organisasi dalam melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, adaptasi sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kegiatan atau program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini berarti, ketika sebuah program diimplementasikan, harus ada fleksibilitas untuk menyesuaikan agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang. Dengan kata lain, adaptasi bukan hanya sekadar merespon perubahan, tetapi mencakup kemampuan untuk mempertahankan keteraturan dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan meski ada dinamika yang terjadi di luar rencana awal. Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan

menjadi salah satu indikator esensial dalam mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan.

Lubis dan Martani (1987) menjelaskan ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas yaitu diantaranya:

a. Pendekatan Sumber (system source approach) merupakan sebuah metode analisis yang mengukur keberhasilan suatu lembaga berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh berbagai sumber yang diperlukan untuk beroperasi secara efisien. Dalam konteks ini, suatu lembaga harus mampu mengidentifikasi dan mengakses berbagai sumber daya yang dapat memastikan kelangsungan dan efektivitas sistem yang dimiliki. Lingkungan eksternal ini berperan penting sebagai penyedia sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, seperti informasi, dukungan masyarakat, dana, atau bahkan kolaborasi dengan organisasi lain. Dengan memahami dinamika dan kebutuhan yang muncul dari lingkungan, lembaga akan lebih mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan yang dijalankan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan operasi yang dilakukan. Sebagai hasilnya, pendekatan sumber ini menjadi sangat krusial dalam menilai seberapa baik suatu lembaga dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan yang ada.
b. Pendekatan Proses (internal process approach) adalah suatu metode evaluasi yang fokus pada efisiensi dan kesehatan internal suatu lembaga. Dalam konteks pendekatan ini, lembaga yang

dianggap efektif adalah yang mampu menjalankan proses internalnya dengan baik, di mana setiap kegiatan dan fungsi dapat berjalan secara terkoordinasi dan harmonis. Pendekatan ini lebih menekankan perhatian pada aktivitas dan operasi di dalam lembaga itu sendiri, tanpa terlalu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Melalui pendekatan proses, analisis akan mencakup evaluasi terhadap alur kerja, struktur organisasi, komunikasi antar tim, dan prosedur internal yang ada. Jika semua elemen ini berjalan dengan lancar dan efisien, maka lembaga dapat dipandang memiliki kondisi yang sehat dan mampu berproduksi dengan baik. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki dari dalam, agar lembaga dapat terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.

c. Pendekatan Sasaran (goal approach) merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana sebuah lembaga berhasil dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan ini, penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan dengan jelas sasaran organisasi, yang kemudian menjadi acuan untuk menilai tingkat keberhasilan dalam mencapainya. Ketika menggunakan pendekatan sasaran, evaluasi efektivitas dilakukan dengan cara memperhatikan sejauh mana program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Oleh karena itu, penentuan sasaran yang

realistis sangat krusial, karena hal ini akan berdampak pada hasil yang dapat diberikan. Pendekatan ini lebih memusatkan perhatian pada aspek output, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan rencana awal yang telah dibuat. Pendekatan sasaran ini membantu lembaga untuk tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan pencapaian hasil yang maksimal. Dengan evaluasi yang baik melalui pendekatan ini, lembaga dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

D. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Definisi CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu bagian integral dari orientasi bisnis modern. Prinsip dasar ketergantungan dan manfaat bersama menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Implementasi dari etika bisnis yang semakin berkembang ini kini tampak jelas melalui CSR. Menurut Situmeang (2016), CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dipahami sebagai wujud kepekaan, perhatian, dan komitmen sosial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dalam

menjalankan bisnis, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan dampak positif kepada komunitas dan lingkungan tempat mereka beroperasi.

Tanggung jawab ini bukan hanya merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi, melainkan juga bagian dari strategi bisnis yang cerdas. Dengan berkontribusi secara nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, perusahaan dapat membangun citra dan reputasi yang baik di mata publik. Reputasi yang positif ini pada gilirannya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, baik dalam hal loyalitas konsumen, kepercayaan investor, maupun daya saing di pasar. CSR bukan hanya tentang memberikan sumbangan materi, tetapi juga mencakup berbagai inisiatif yang berkelanjutan, seperti pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang aktif dalam CSR akan lebih mudah menjalin hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan serta mendukung keberlangsungan jangka panjang.

CSR mencerminkan kesadaran perusahaan akan perannya dalam menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Perusahaan yang mengintegrasikan CSR dalam model bisnisnya tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik investasi, karena semakin banyak

konsumen yang menghargai komitmen sosial perusahaan. Jadi, CSR menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk berkontribusi pada dunia yang lebih baik sambil sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar.

Menurut Bowen dalam Suripto dan Pamulang (2023), Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, atau melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perusahaan harus sejalan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Dalam analisis yang disampaikan oleh Suripto dan Pamulang (2023), CSR mencerminkan sikap publik terhadap penggunaan sumber daya, di mana fokusnya tidak hanya pada profit semata (keuntungan) tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat (*people*).

Pendekatan ini menekankan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebaiknya digunakan untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam mencapai tujuan sosial yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau keuntungan jangka pendek perusahaan. Dengan demikian, CSR bukan hanya tentang memberikan sumbangan atau bantuan sosial, tetapi lebih kepada pengintegrasian nilai-nilai sosial dalam setiap aspek operasional perusahaan. Ini merupakan sebuah paradigma baru yang mengajak perusahaan untuk berpikir secara holistik mengenai dampak aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan

memprioritaskan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan reputasi merek, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Ada banyak istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Iriantara (2004), istilah "kewarganegaraan korporat" (*corporate citizenship*) dan "hubungan komunitas perusahaan" (*corporate community relationship*) sejatinya memiliki makna yang sama dengan CSR. Dalam konteks yang lebih luas, CSR dipahami sebagai sebuah konsep yang lebih manusiawi, di mana organisasi dianggap sebagai agen moral yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini, CSR melibatkan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai etika dan sosial, serta mengharuskan organisasi untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas mereka. Dengan demikian, CSR tidak hanya dilihat dari sudut pandang keuntungan finansial, tetapi juga dari bagaimana perusahaan berinteraksi dengan komunitas dan lingkungan sekitarnya. Adapun komponen-komponen dari Corporate Social Responsibility menurut Sukada (2007) mencakup berbagai aspek yang mendasari pelaksanaan CSR yang efektif. Komponen-komponen ini perlu diperhatikan agar perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai komponen tersebut:

a. *The environment* (Lingkungan) : Perusahaan harus berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini mencakup pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya secara efisien, dan perlindungan ekosistem. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat berkontribusi pada kelestarian alam dan keberlanjutan jangka panjang.
b. *Social development* (Pengembangan Sosial) : Pengembangan sosial melibatkan usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan perlu berinvestasi dalam program yang mendukung pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan komunitas lokal. Melalui pengembangan sosial, perusahaan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar, mengurangi kesenjangan sosial, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
c. *Human rights* (Hak Asasi Manusia) : Perusahaan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia, baik di dalam organisasi maupun dalam interaksinya dengan pihak eksternal. Ini mencakup memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dan lain-lain. Perusahaan juga harus memastikan bahwa operasinya tidak melanggar hak-hak individu atau komunitas. Dengan memprioritaskan hak asasi manusia, perusahaan dapat membangun lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan harmonis, serta mempertahankan kepercayaan dari karyawan dan masyarakat.

d. *Organizational governance* (Tata Kelola Organisasi) : Tata kelola organisasi mencakup sistem, proses, dan aturan yang diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan etika yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mampu mengelola risiko, mematuhi regulasi, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Tata kelola yang kuat juga memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang bijaksana, menghindari konflik kepentingan, dan menjamin integritas dalam operasional bisnisnya.
e. *Labor practices* (Praktik Ketenagakerjaan) : Praktik ketenagakerjaan yang adil dan etis sangat penting untuk kesejahteraan karyawan. Perusahaan harus memastikan lingkungan kerja yang aman, upah yang layak, hak-hak pekerja dilindungi, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional. Praktik ketenagakerjaan yang baik menciptakan motivasi dan loyalitas di antara karyawan, serta mendorong produktivitas dan inovasi.
f. *Fair operating practice* (Praktik Operasi yang Adil) : Perusahaan harus menjalankan operasinya dengan adil dan transparan, termasuk dalam aspek hubungan dengan pemasok, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini melibatkan komitmen untuk menghindari praktik korupsi, suap, dan persaingan yang tidak sehat. Perusahaan yang menerapkan praktik operasi yang adil dapat

membangun kepercayaan dan reputasi baik, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.

g. *Consumer issue* (Isu Konsumen) : Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap hak-hak konsumen, seperti memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan aman, berkualitas, dan sesuai dengan ekspektasi. Transparansi dalam komunikasi dengan konsumen, perlindungan data pribadi, serta layanan purna jual yang baik juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab ini. Dengan fokus pada kepuasan dan perlindungan konsumen, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendorong keberhasilan bisnis jangka panjang.

Harmoni dan Andriyani (2008) menjelaskan bahwa inti dari keberadaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tujuan utama untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. CSR berfungsi sebagai landasan penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa operasional bisnisnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Salah satu strategi penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut adalah dengan membangun hubungan dan kerja sama yang harmonis serta efektif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (stakeholders), yang meliputi masyarakat lokal, pemerintah, konsumen, karyawan, investor, serta mitra

bisnis lainnya. Kolaborasi yang solid dengan para stakeholder ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, sehingga perusahaan dapat merumuskan dan melaksanakan program CSR yang relevan dan berdampak nyata. Kerjasama ini difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan program-program pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan tempat perusahaan beroperasi.

Berbagai pengertian terkait CSR, dapat disimpulkan bahwa CSR lebih dari sekadar tanggung jawab sosial, ia juga merupakan bagian dari operasi bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi. Konsep ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, CSR tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban moral, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan dapat berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Hal ini menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana perusahaan dapat mendapatkan dukungan dari komunitas serta membangun reputasi yang baik, sementara masyarakat juga mendapatkan manfaat nyata dari keberadaan dan operasi perusahaan tersebut. Melalui CSR yang tepat, perusahaan bukan hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

2. Tujuan dan Manfaat CSR

a. Tujuan CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai pengelolaan hubungan sosial yang bertujuan untuk meraih keuntungan sekaligus memberikan dampak positif kepada masyarakat secara menyeluruh. Fungsi ini sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR berperan besar dalam memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan di semua aspek operasional, seperti reputasi, loyalitas pelanggan, hingga kinerja finansial. Prof. Totok Mardikanto (2014), mengemukakan beberapa tujuan dari pelaksanaan CSR. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengarahkan perusahaan agar mampu menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa tujuan tersebut:

a) CSR sebagai tindakan etis, CSR merupakan wujud dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, di mana perusahaan berperilaku secara etis dalam operasionalnya.
b) Meningkatkan citra perusahaan, pelaksanaan CSR, reputasi dan citra perusahaan di mata publik akan

semakin baik, karena perusahaan dianggap peduli terhadap isu sosial dan lingkungan.

c) Menghindari regulasi berlebihan, dengan melakukan CSR, perusahaan dapat mengurangi risiko dikenai peraturan yang ketat, karena menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara sukarela.

d) Mendapatkan keuntungan dari kegiatan sosial, kegiatan CSR yang tepat dapat memberikan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan, seperti peningkatan loyalitas konsumen dan pengembangan pasar.

e) Manfaat dari lingkungan sosial yang lebih baik, CSR membantu perusahaan berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial dan lingkungan di sekitar mereka, yang pada akhirnya juga menguntungkan operasional perusahaan.

f) Menarik minat investor, banyak investor yang tertarik berinvestasi di perusahaan yang memiliki program CSR, karena perusahaan tersebut dianggap lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

g) Meningkatkan motivasi karyawan, pelaksanaan CSR dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan,

karena mereka merasa bekerja di perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan sosial.

h) Mengatasi masalah sosial akibat kegiatan bisnis, CSR dapat membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh operasional bisnis, seperti kerusakan lingkungan atau isu sosial lainnya, dengan menerapkan program tanggung jawab sosial yang efektif.

b. Manfaat

Adapun manfaat dari pengadaan CSR menurut Suripto dan Pamulang (2023) dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat CSR bagi masyarakat sangat beragam dan berpengaruh positif dalam banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yakni sebagai berikut:

a) Menciptakan peluang kerja, CSR dapat membantu masyarakat dengan membuka peluang pekerjaan baru, menciptakan kesempatan kerja, serta memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan lokal.

b) Investasi dalam komunitas dan infrastruktur, dengan CSR perusahaan berinvestasi dalam pengembangan komunitas, termasuk kontribusi dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan masyarakat.

c) Pengembangan keterampilan komersial, CSR berperan dalam membantu masyarakat mendapatkan keahlian komersial yang bermanfaat, baik dalam bidang usaha maupun pekerjaan sehari-hari.

d) Peningkatan kompetensi teknis pekerja, dengan program CSR juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan kemampuan individu, khususnya dalam hal kompetensi teknis yang mendukung karier mereka.

e) Promosi prakarsa komunitas oleh bisnis, perusahaan yang menjalankan CSR mempromosikan prakarsa-prakarsa komunitas, yang memperlihatkan komitmen mereka dalam mendukung inisiatif sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Manfaat CSR bagi pemerintah bagi pemerintah sangat penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yakni sebagai berikut:

a) Dukungan pembiyaan, menanggulangi kemiskinan serta membantu dalam menutupi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah

b) Dukungan sarana dan prasarana, banyak sekali yang dapat dibangun meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, pelatihan, tempat ibadah dan lainnya

c) Dukungan keahlian, dalam kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat, perusahaan melakukan penyuluhan serta sosialisasi

d) Keterlibatan kelompok masyarakat atau LSM dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam rangka penumbuhan, penggerakan serta pemeliharaan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan

3) Manfaat CSR bagi Korporasi sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan reputasi hingga keberlanjutan bisnis, yakni sebagai berikut:

a) Meningkatkan dan menjaga reputasi serta citra mereka, CSR membantu perusahaan mempertahankan citra positif dan bahkan meningkatkan reputasi mereknya di mata masyarakat.

b) Memperoleh legitimasi sosial untuk beroperasi, dengan menjalankan program CSR, perusahaan dapat memperoleh "lisensi sosial" dari masyarakat untuk terus beroperasi tanpa penolakan atau konflik.

c) Memperluas akses terhadap sumber daya operasional, CSR memungkinkan perusahaan mendapatkan akses lebih luas ke sumber daya penting yang dibutuhkan untuk operasionalnya melalui kemitraan dan hubungan sosial yang lebih baik.
d) Memperluas peluang pasar, CSR dapat membuka peluang baru di pasar dengan menarik konsumen yang lebih peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
e) Mengurangi biaya operasional, CSR juga dapat membantu menekan biaya, seperti dengan mengurangi biaya pengelolaan limbah atau meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
f) Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, Program CSR dapat mempererat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, dan komunitas lokal.
g) Memperbaiki hubungan dengan otoritas pengatur, CSR yang baik dapat membantu perusahaan menjalin hubungan yang lebih baik dengan regulator, sehingga meminimalkan risiko denda atau sanksi.

h) Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, program CSR yang kuat juga dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat, meningkatkan semangat kerja mereka, serta produktivitas keseluruhan.

i) Mendapatkan peluang penghargaan, perusahaan yang aktif dalam CSR memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi sosial dan lingkungan mereka.

E. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah zona transisi yang menjadi titik pertemuan antara daratan dan lautan. Dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu yang disusun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan yang menghubungkan ekosistem darat dengan ekosistem laut. Ini terletak di antara batas lahan, menuju darat sejauh pasang tertinggi, dan ke arah laut sejauh dampak dari aktivitas darat. Lebih jauh lagi, menurut Kay dan Alder dalam Kristian (2021), wilayah pesisir memiliki karakteristik yang unik. Bentang alam pesisir bukan hanya sekadar area transisi, tetapi juga menawarkan keanekaragaman ekosistem yang kaya. Hal ini menjadikan wilayah pesisir sangat penting untuk diperhatikan dari sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Wilayah ini berfungsi sebagai sumber daya

yang esensial, karena menyediakan berbagai manfaat, seperti tempat tinggal untuk berbagai spesies biota laut, sumber mata pencaharian bagi penduduk setempat, serta potensi wisata yang dapat dikembangkan. Dengan karakteristiknya yang unik dan kompleks, pengelolaan wilayah pesisir memerlukan pendekatan yang cermat dan berkelanjutan, sehingga semua manfaat yang ditawarkan oleh ekosistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak kelestariannya. Keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Secara historis, banyak kota-kota besar di dunia terletak tidak jauh dari laut, mengingat kawasan pesisir memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Keberadaan potensi tersebut tentunya memudahkan aktivitas perdagangan antar daerah, pulau, maupun benua. Hal ini menjadikan wilayah pesisir bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang vital. Di Indonesia, wilayah laut dan pesisir memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi nasional. Dengan panjang garis pantai yang signifikan dan sumber daya kelautan yang kaya, kawasan ini bisa diandalkan sebagai pilar ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Potensi ini tidak hanya terletak pada sektor perikanan, tetapi juga mencakup pariwisata, pelabuhan, dan berbagai industri berbasis laut lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya

di wilayah laut dan pesisir sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian ekosistem menjadi tantangan yang cukup kompleks. Tantangan ini muncul karena di satu sisi, eksploitasi sumber daya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi negara. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap lingkungan harus tetap diperhatikan agar ekosistem yang ada tidak mengalami kerusakan permanen. Keseimbangan yang bijaksana antara kedua aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan menjaga kelestarian ekosistem, masyarakat dan negara dapat terus menikmati manfaat dari sumber daya alam tanpa mengorbankan kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan secara keseluruhan. Yonvitner, Susanto & Yuliana (2019) memaparkan bahwa karakteristik umum wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut:

a. Pesisir merupakan kawasan yang sangat strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah untuk dikembangkan. Kondisi ini memungkinkan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi, seperti pelabuhan, fasilitas pariwisata, dan permukiman. Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki akses yang baik karena memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi dan

perdagangan. Aksesibilitas yang baik ini memungkinkan barang dan jasa dapat dipindahkan secara efisien antara daerah, pulau, bahkan benua. Dengan adanya jalur laut, kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan ekonomis, memungkinkan wilayah tersebut untuk bertumbuh sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Keberadaan laut juga memberikan peluang untuk berbagai industri berbasis kelautan, seperti perikanan, budidaya laut, dan pariwisata bahari. Semua faktor ini menjadikan pesisir sebagai kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang besar, sekaligus keberlanjutan sumber daya yang harus dikelola dengan bijaksana agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar.

b. Pesisir diidentifikasi sebagai kawasan yang sangat strategis karena memiliki topografi yang secara relatif mudah untuk dikembangkan. Ini berarti bahwa lahan di kawasan tersebut dapat lebih cepat dan efisien digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, permukiman, dan fasilitas publik. Selain itu, wilayah pesisir juga menawarkan akses yang sangat baik, terutama dengan memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi. Dengan adanya laut di sekitar, kawasan pesisir bisa memanfaatkan jalur laut untuk berbagai aktivitas perdagangan dan distribusi barang, yang dapat menghubungkan daerah-daerah dengan lebih baik. Jalur laut ini memungkinkan berbagai jenis komoditas, baik dari sektor perikanan

maupun hasil alam lainnya, untuk dipasarkan secara lebih luas, termasuk ke pasar internasional. Kualitas aksesibilitas ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, karena memudahkan mobilitas sumber daya, baik manusia maupun barang, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan. Namun, pengembangan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan tetap terjaga.

c. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang berasal dari ruang daratan maupun lautan. Keberagaman sumber daya ini sangat penting karena langsung berkaitan dengan berbagai kebutuhan manusia. Di area daratan, pesisir menyediakan tanah yang subur untuk pertanian, lahan untuk pemukiman, serta berbagai sumber daya lainnya seperti mineral dan bahan baku. Sementara itu, di lautan, kawasan pesisir kaya akan potensi perikanan, seperti ikan, udang, dan hasil laut lainnya, yang menjadi sumber protein penting bagi banyak orang. Sumber daya alam yang melimpah di kawasan pesisir ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari pangan, energi, bahan baku industri, hingga rekreasi dan pariwisata. Dengan pemanfaatan yang bijaksana, kawasan pesisir dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, asalkan pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan

sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pengembangan yang berkelanjutan di pesisir sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua potensi yang ada dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Adapun karakteristik yang lain dipaparkan oleh Hasan (2017) yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah pesisir sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan fisik yang signifikan akibat pengaruh angin dan gelombang. Dinamika ini terjadi karena interaksi terus-menerus antara atmosfer dan lautan. Misalnya, gelombang yang kuat dapat mengikis tanah di sepanjang pantai, sementara sedimentasi dari sungai yang bermuara ke laut dapat membentuk delta baru. Proses ini merupakan bagian dari siklus alami yang berkontribusi terhadap pembentukan dan evolusi ekosistem pesisir. Selain itu, perubahan fisik yang terjadi juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti pembangunan infrastruktur, pengambangan lahan, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini agar pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan dengan bijaksana.
b. Wilayah pesisir termasuk dalam kategori ekosistem yang memiliki nilai yang sangat tinggi, baik dari segi produktivitas maupun keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang dimilikinya. Ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, dikenal memiliki produktivitas primer yang tinggi, yang berarti mereka

mampu menghasilkan biomassa yang besar melalui proses fotosintesis. Keanekaragaman hayati di kawasan pesisir juga sangat mengesankan. Ekosistem ini menjadi habitat bagi sejumlah besar spesies, mulai dari ikan, krustasea, moluska, hingga berbagai jenis flora seperti alga dan tanaman darat. Selain itu, ekosistem pesisir berfungsi sebagai penyangga alami yang melindungi daratan dari fenomena cuaca ekstrem dan perubahan iklim, seperti gelombang tinggi dan badai. Kemampuan ini menambah nilai ekologis kawasan pesisir, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya.

c. Wilayah pesisir memiliki sumber daya yang sangat penting dalam melindungi kawasan tersebut dari risiko bencana alam seperti banjir, gelombang badai, dan tsunami. Sumber daya ini terutama terdiri dari ekosistem alami seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang semuanya berkontribusi dalam menyediakan perlindungan yang efektif. Dengan demikian, keberadaan sumber daya alam ini di wilayah pesisir bukan hanya penting untuk keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem, tetapi juga vital dalam memberikan perlindungan terhadap bencana alam yang dapat berdampak parah bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan yang baik terhadap ekosistem ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan daerah pesisir

terhadap perubahan iklim dan meningkatkan keselamatan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

d. Wilayah pesisir memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi dan seringkali menjadi lokasi pemukiman masyarakat yang padat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung kehidupan dan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut yaitu potensi sumber daya ekonomi, pariwisata, transportasi dan perdagangan, pemukiman masyarakat. Ini guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mengorbankan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, kawasan pesisir dapat terus berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang produktif sekaligus melestarikan lingkungan yang ada.
e. Di kawasan pesisir, pusat kegiatan dan seluruh aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya sangat erat kaitannya dengan lautan. Laut menawarkan berbagai peluang yang menjadi sumber kehidupan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. lautan bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir. Penting untuk memastikan bahwa aktivitas ini dilakukan secara berkelanjutan agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem laut yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Pengelolaan yang bijaksana terhadap

sumber daya laut akan memastikan bahwa masyarakat dapat terus menikmati manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada, sambil mempertahankan kelestariannya untuk generasi mendatang.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir diketahui berdasarkan pada beberapa unsur dan elemen yang mendasar yakni:

a. Pertemuan antara daratan dan lautan; Wilayah pesisir adalah area transisi yang menjadi titik pertemuan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Bentang alam ini menciptakan interaksi antara kedua ekosistem yang sangat beragam dan kaya akan keanekaragaman hayati.
b. Terdapat interaksi berbagai ekosistem; Di kawasan pesisir, terdapat berbagai ekosistem yang saling berinteraksi, seperti ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Interaksi ini penting untuk mendukung keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan ekologis yang ada.
c. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut; Kawasan pesisir kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi, seperti perikanan, pariwisata, dan sumber daya mineral. Pemanfaatan ini memberikan peluang bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
d. Terdapat batas batas; Wilayah pesisir memiliki batas-batas yang jelas, baik secara administratif maupun ekologis. Hal ini berkaitan

dengan perhitungan jarak dari garis pantai ke arah laut dan daratan, serta pengelompokan ekosistem yang ada di dalamnya.

Memahami berbagai unsur dan elemen yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir, kita dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk merencanakan dan mengelola kawasan tersebut secara berkelanjutan. Pendekatan yang tepat akan memastikan bahwa potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal, tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem yang rapuh. Hal ini sangat penting karena keseimbangan ekosistem pesisir tidak hanya memengaruhi lingkungan lokal, tetapi juga berperan penting dalam stabilitas iklim global dan keberlanjutan ekonomi yang bergantung pada sumber daya laut. Pengelolaan yang berkelanjutan juga akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui sumber daya yang dikelola dengan bijaksana. Selain itu, pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa ekosistem pesisir yang vital ini tetap terjaga untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang, sehingga keuntungan dan manfaat yang dihasilkan dari wilayah pesisir dapat dirasakan secara berkelanjutan, baik bagi kehidupan sekarang maupun di masa depan.

Sangat penting untuk memperhatikan pengelolaan wilayah pesisir secara cermat, karena kawasan ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman, baik dari faktor alam maupun aktivitas manusia. Mengingat kerentanannya, pengelolaan wilayah pesisir

memerlukan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Semua pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam pengelolaan kawasan ini, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan, harus berkolaborasi secara sinergis. Tanpa keterpaduan yang baik, potensi kerusakan yang dialami wilayah pesisir, seperti degradasi ekosistem laut, abrasi pantai, dan pencemaran, akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan inklusif sangat diperlukan, melibatkan seluruh pihak yang terpengaruh atau berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekologi wilayah pesisir, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya alam di kawasan tersebut. Tentunya setiap langkah yang diambil akan berpengaruh terhadap kebermanfaatan dalam melindungi lingkungan, dan juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir. Menurut Hasan (2017) bahwa tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir ini yaitu sebagai:

a. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan lautan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di kawasan pesisir dan perairan, seperti hasil perikanan, pariwisata, serta kekayaan alam lainnya, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat nasional. Aktivitas pemanfaatan ini tidak

hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian lokal, terutama dalam memperkuat mata pencaharian masyarakat pesisir dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh sebab itu, sangat penting untuk merumuskan strategi yang berkelanjutan dan efisien dalam memanfaatkan potensi pesisir dan lautan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan para pengelola, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi daerah secara lebih luas. Dengan menerapkan pendekatan yang terintegrasi, kita bisa memastikan bahwa eksploitasi sumber daya di wilayah pesisir dan lautan dilakukan secara optimal, tanpa mengabaikan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada.

b. Adanya keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem wilayah pesisir sangatlah penting untuk mendukung kelestarian sumber daya pesisir dan lautan. Dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi yang ditawarkan oleh kawasan ini, seperti perikanan, pariwisata, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya, kita perlu memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak merusak ekosistem yang ada. Pelestarian ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, memiliki peranan krusial dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mendukung kehidupan berbagai spesies. Dengan menjaga

ekosistem ini, kita dapat memastikan bahwa sumber daya laut tetap tersedia dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Wilayah pesisir akan dapat bersinergi secara optimal dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya jika pengelolaannya dilakukan dengan baik dan berkelanjutan. Pengelolaan yang efektif meliputi beberapa aspek kunci, mulai dari perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan rencana komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu, konservasi sumber daya alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem. Upaya seperti melindungi hutan mangrove dan terumbu karang akan membantu menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan berkelanjutan juga krusial agar mereka dapat lebih terlibat dalam upaya konservasi.

Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dalam praktik perikanan dan pariwisata, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan secara rutin, akan semakin meningkatkan efektivitas program pengelolaan yang diterapkan. Jika semua aspek ini diperhatikan dan dikelola secara terpadu, wilayah pesisir akan mampu memaksimalkan potensi yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam, menjadikan

kawasan pesisir sebagai sumber kehidupan yang tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan ekosistem secara keseluruhan.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang tertera pada tabel di bawah ini merupakan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaannya adalah bahwa baik penelitian terdahulu tersebut maupun penelitian yang akan dilakukan ini sama-sama memfokuskan pada efektivitas pengelolaan suatu program. Namun, perbedaan mencolok terletak pada variabel dan indikator penelitian yang digunakan, yang memungkinkan munculnya hasil yang berbeda. Selain itu, perbedaan lain juga terlihat pada lokus penelitian, di mana lokasi atau konteks penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi temuan dan kesimpulan yang dihasilkan, serta memberikan kontribusi yang lebih kaya dalam memahami pengelolaan program yang efisien dan efektif. Oleh karena itu berikut dapat diuraikan masing-masing hasil penelitian terdahulu dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Ceria Nugraga Indotama dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka (Iswadi Amiruddin/ 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Ceria Nugraha Indotama dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka belum efektif, meskipun pada: a) aspek konteks dan b) aspek input sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim CSR/PPM. Sedangkan pada c) aspek proses dan d) aspek produk masih belum sesuai ekspektasi masyarakat.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diketahui hasil penelitian pada tesis yang berjudul Efektivitas Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng masih belum efektif hal ini berdasarkan telaah yang dilakukan menggunakan teori yang dipaparkan oleh Steers (1980) yaitu: (1) Pencapaian Tujuan, dimana distribusi program CSR yang dilaksanakan masih belum mencakup seluruh	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa program CSR PT Huadi Nickel Alloy Indonesia belum efektif, terutama dalam hal distribusi yang tidak mencakup semua masyarakat yang membutuhkan, serta komunikasi yang kurang baik antara perusahaan dan masyarakat. Ini sejalan dengan temuan pada penelitian di PT Ceria Nugraha Indotama dan penelitian di PT Pelindo IV, yang juga menghadapi ketidakefektifan program, terutama dalam distribusi dan ketercapaian sasaran. Penelitian ini menambahkan perspektif konflik sosial sebagai dampak negatif dari CSR yang tidak optimal, berbeda dari penelitian lain yang fokus pada ketidaktepatan sasaran. Selain	Pada penelitian ini berfokus pada efektivitas program CSR PT Huadi Nickel Alloy Indonesia dengan pendekatan teori Steers, menyoroti masalah dalam pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hal ini berbeda dengan penelitian lain yang umumnya menggunakan pendekatan tahapan (perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan) atau aspek konteks, input, proses, dan produk. Penelitian ini juga menyoroti konflik sosial sebagai dampak negatif dari CSR, sedangkan penelitian lain lebih banyak menyoroti masalah distribusi dan ketidaktepatan sasaran tanpa mengangkat isu konflik. Selain itu, penelitian tentang dana bergulir masyarakat merekomendasikan campur tangan pemerintah untuk legalitas,
Mengungkap Efektivitas Program Kemitraan dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan			

Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
Bina Lingkungan sebagai Strategi *Corporate Social Responsibility* PT. Pelindo IV Makassar (Jumiaty/ 2021)	program CSR melalui program kemitraan dan bina lingkungan yang dijalankan PT Pelindo IV masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dibuktikan dengan melihat bahwa program masih belum tepat sasaran dan tidak merata kepada masyarakat.	masyarakat yang butuh. (2) Integrasi, yang menunjukkan bahwa komunikasi antara perusahaan dan masyarakat masih kurang optimal. (3) Adaptasi, seharusnya memberi manfaat namun hanya menyebabkan konflik antar masyarakat.	itu, penelitian tentang hibah dana bergulir menunjukkan pentingnya regulasi pemerintah, yang memperlihatkan perlunya dukungan hukum pada beberapa konteks CSR. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi, distribusi yang tepat, dan perlunya pengelolaan CSR yang lebih adaptif untuk mencapai dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.	sementara penelitian ini lebih berfokus pada faktor internal perusahaan. Terakhir, penelitian lain ada yang menunjukkan dampak positif CSR yang cukup tinggi pada aspek sosial, berbeda pada penelitian ini yang menunjukkan ketidakefektifan pada beberapa aspek.
Efektivitas Pelaksanaan Program *Corcoporate Social Responsibility* (Studi Kasus Program Kemitraan PKBL PT. Pertamina Persero UPMS VII Makassar (Nining Haslinda Zainal/ 2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan program kemitraan diukur dalam empat tahapan: a)tahap perencanaan, b)tahap implementasi, c)tahap evaluasi, d) pelaporan. Dalam penelitian ini pelaksanaan program			

Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
	kemitraan PKBL PT. Pertamina (Persero) UPMS VII Makassar termasuk dalam kategori efektif.			
Kajian Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR): Studi Kasus Perusahaan Pembangkit Energi “Y” (Adityo Wicaksono, Mahardhika Berliandaldo, Firman Tri Ajie, Kirana Rukmayuninda Ririh/ 2021)	Dalam studi kasus perusahaan ini menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan “cukup efektif” dengan total dampak positif yang ditimbulkan sebesar Rp. 2,69 untuk tiap rupiah yang diinvestasikan. Namun, perusahaan ini lebih cenderung berdampak pada aktivitas sosial dibanding lingkungan.			
Efektivitas Pengelolaan Hibah Dana Bergulir Eks. PNPM Mandiri Perdesaan oleh Unit Pengelola Kegiatan	Hibah dana bergulir masyarakat selanjutnya menjadi modal abadi masyarakat se wilayah kecamatan.			

Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
(UPK) Kecamatan Panekaan Kabupaten Magetan (Suratno/ 2021)	Sistem pengelolaan yang dilaksanakan masih tetap efektif terbukti dana terus berkembang dan lestari. Terhadap sistem pengelolaan yang dijalankan dan dana bergulir masyarakat serta pengelola aset masyarakat ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi dengan sebuah payung hukum agar ketiganya mendapatkan legalitas secara hukum.			

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting untuk ditelaah. Dalam penelitian ini, variabel yang akan digunakan adalah efektivitas. Variabel ini sangat relevan untuk memahami

bagaimana suatu program atau kebijakan dapat diaplikasikan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Adapun indikator dari variabel efektivitas ini merujuk pada teori yang diajukan oleh Richard M. Steers (1980) yang mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan, Ini mengukur seberapa baik suatu program atau kebijakan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dianalisis melalui perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ingin diraih.
2. Integrasi, Ini mengacu pada kemampuan organisasi atau program untuk membangun kerja sama dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan adanya integrasi yang baik, semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan harmonis untuk mencapai tujuan bersama.
3. Adaptasi, Indikator ini menilai seberapa baik suatu organisasi atau program dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Adaptasi yang baik memungkinkan program untuk tetap relevan dan efektif meskipun menghadapi tantangan baru.

Indikator yang diambil dari variabel efektivitas ini dapat dijadikan sebagai dasar yang ideal untuk penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. Dengan indikator-indikator yang mencakup Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejauh mana pengelolaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkapkan efektivitas pengelolaan CSR secara lebih menyeluruh, sehingga hasilnya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh program CSR tersebut.

Berikut beberapa alasan penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1980) yaitu :

a. Relevan dengan tujuan penelitian, di mana fokus utamanya adalah untuk memahami pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. Dalam konteks ini, indikator-indikator yang telah ditentukan, seperti Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi, berperan penting untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan melaksanakan program CSR-nya.
b. Indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini juga memiliki kelebihan dalam hal kemudahan pengukuran. Menurut penulis, indikator-indikator tersebut mudah digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan yang jelas dan terstruktur, peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan informasi yang relevan untuk

mengevaluasi pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Indikator seperti Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi dapat diukur melalui berbagai metode, seperti kuesioner, wawancara, atau observasi langsung di lapangan. Kemudahan dalam pengukuran ini sangat penting karena akan mempercepat proses pengumpulan data dan analisis, sehingga peneliti dapat dengan segera menarik kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan CSR. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan hasil yang akurat dan relevan di dalam konteks CSR yang diterapkan oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampaknya terhadap masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng.

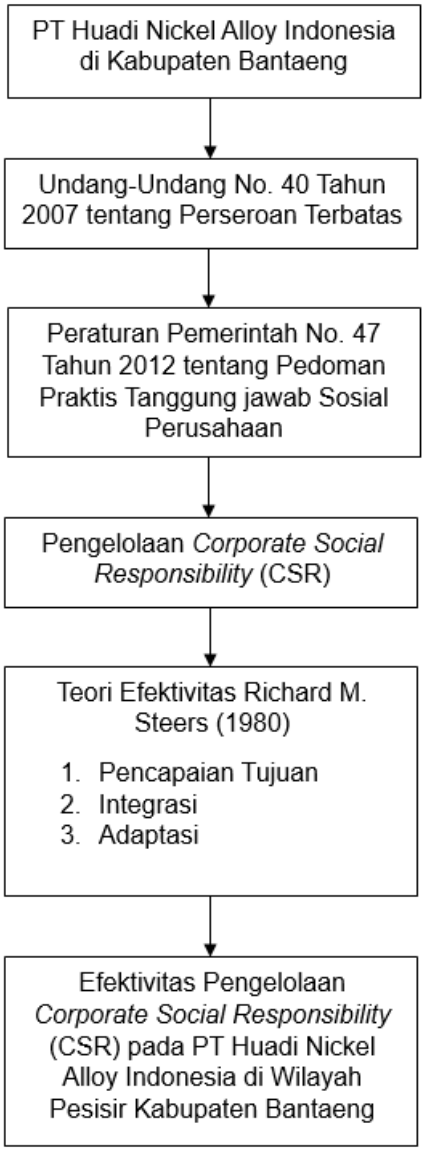

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran